

BAB II
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN:
“KABUPATEN MAGELANG”

Pemaparan pada bab 2 akan berisi penyajian data mengenai gambaran garis besar Kabupaten Magelang secara umum sebagai daerah penelitian dari berbagai aspek, baik mengenai demografi sosial maupun dinamika politik yang terjadi. Pembahasan pada bab 2 akan dibagi menjadi 5 sub bab utama, yakni:

- Sub-bab 2.1 Kondisi Demografi
- Sub-bab 2.2 Gambaran Umum dan Sejarah
- Sub-bab 2.3 Kondisi Sosial Ekonomi
- Sub-bab 2.4 Kondisi Politik Lokal dan Kepemiluan
- Sub-bab 2.5 Penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Salaman	37.645	37.343	74.988
Borobudur	31.743	31.285	63.028
Ngluwar	16.257	16.366	32.623
Salam	24.158	24.227	48.385
Srumbung	24.321	24.381	48.702
Dukun	23.412	23.488	46.900
Muntilan	40.101	40.161	80.262
Mungkid	37.508	37.784	75.292
Sawangan	29.192	28.831	58.023
Candimulyo	25.472	24.783	50.255
Mertoyudan	58.037	59.002	117.039
Tempuran	26.680	26.030	52.710
Kajoran	30.752	29.745	60.497
Kaliangkrik	30.858	29.546	60.404
Bandongan	31.635	30.294	61.929
Windusari	26.880	25.395	52.275
Secang	41.748	41.612	83.360
Tegalrejo	27.568	27.349	54.917
Pakis	27.914	26.749	54.663
Grabag	47.796	46.403	94.199
Ngablak	21.454	20.668	42.122

Sumber: BPS Kabupten Magelang Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total penduduk Kabupaten Magelang sebesar 1.312.573 jiwa dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu berada di Kecamatan Mertoyudan sebesar 80.262 jiwa dan jumlah penduduk terkecil yaitu di Kecamatan Ngluwar sebesar 32.623 jiwa. Ini bersumber pada BPS proyeksi penduduk interim 2020-2023.

Tabel 2. 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4 tahun	49.816	47.759	97.575
5-9 tahun	46.962	45.310	92.272
10-14 tahun	47.861	46.330	94.191
15-19 tahun	50.700	48.033	98.733
20-24 tahun	50.558	47.947	98.505
25-29 tahun	52.396	49.724	102.120
30-34 tahun	50.413	48.123	98.536
35-39 tahun	48.195	45.995	94.190
40-44 tahun	47.292	46.396	93.688
45-49 tahun	47.638	47.659	95.297
50-54 tahun	45.412	46.370	91.782
55-59 tahun	41.433	42.923	84.356
60-64 tahun	33.276	35.176	68.452
65-69 tahun	26.813	27.957	54.770
70-74 tahun	18.394	20.321	38.715
75+ tahun	17.188	21.077	38.265
Kabupaten Magelang	674.347	667.100	1.341.447

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas masyarakat Kabupaten Magelang dengan usia produktif (15-64 tahun) mencapai 925.659 dan sekaligus menjadi kelompok usia terbanyak dalam catatan penduduk. Komposisi ini berimplikasi pada besarnya jumlah pemilih potensial dalam Pemilu 2024. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024

mencapai 1.007.591 jiwa yang tersebar do 21 kecamatan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, 2023). Besarnya jumlah pemilih ini menunjukkan bahwa dinamika politik lokal sangat ditentukan oleh kapasitas literasi politik.

Tingkat pendidikan penduduk juga merupakan salah satu indikator demografi penting yang menggambarkan karakter sumber daya manusia di Kabupaten Magelang. Pendidikan juga menjadi indikator dalam pengukuran Indeks Pengembangan Manusia (IPM). Pendidikan dengan indikator tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat partisipasi pendidikan merupakan salah satu indikator inti dalam survei kesejahteraan rakyat (Efendi, Nasution , Rusiadi, & Pratiwi, 2024). Komposisi pendidikan diatas memberikan gambaran bahwa meskipun sebagian masyarakat telah menempuh pendidikan menengah, proporsi lulusan pendidikan tinggi di Kabupaten Magelang relatif kecil. Tingkat pendidikan seringkali berkorelasi dengan akses terhadap informasi dan kemampuan individu dalam memahami isu politik serta keputusan politik yang rasional.

Aspek lain dari demografi adalah komposisi wilayah dan sebaran penduduk antar kecamatan. Komposisi wilayah merujuk pada pengelompokan penduduk yang berlandaskan pada karakteristik geografis, seperti jarak desa, administratif, atau tipe wilayah. Hal ini menjadi krusial untuk menganalisis persebaran penduduk, kepadatan, dan mobilitas guna mendeskripsikan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang. Karakteristik wilayah Kabupaten Magelang yang sebagian besar bersifat perdesaan juga memengaruhi distribusi informasi politik. Akses terhadap media digital dan informasi politik tidak merata di seluruh kecamatan. Kondisi ini menjadikan pendidikan politik dan pendidikan pemilih memiliki peran strategis

dalam meningkatkan kapasitas pemilih, terutama dalam konteks kompetensi demokratis yang menuntut pemahaman rasional dan otonomi dalam menentukan pilihan politik.

Kondisi demografis Kabupaten Magelang menunjukkan adanya kombinasi antara jumlah pemilih yang besar, tingkat pendidikan yang bervariasi, serta karakter wilayah semi-perdesaan yang berpotensi memengaruhi kualitas literasi politik masyarakat. Kondisi ini relevan untuk mengkaji sejauh mana pendidikan politik dan pendidikan pemilih berpengaruh terhadap kompetensi demokratis pemilih pada pemilu 2024.

2.2 Gambaran Umum dan Sejarah

Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki posisi geografis strategis karena berada di kawasan tengah Pulau Jawa serta mengelilingi Kota Magelang (*enclave*). Secara astronomis wilayah ini terletak pada 110°01'–110°26' BT dan 7°19'–7°42' LS dengan luas wilayah sekitar 1.085,73 km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2024). Secara topografis, wilayah Kabupaten Magelang didominasi daerah dataran tinggi dan pegunungan karena berada di antara beberapa gunung besar, yaitu Merapi, Merbabu, Sumbing, Telomoyo, dan Andong. Kondisi tersebut menyebabkan karakter sosial ekonomi masyarakat banyak bertumpu pada sektor pertanian, hortikultura, serta pariwisata alam dan budaya. Hal ini menjadikan Kabupaten Magelang berada di kawasan strategis karena diapit oleh beberapa wilayah penting, antara lain Kabupaten Temanggung di sebelah utara, Kabupaten Semarang di timur laut, Kabupaten Boyolali di timur, Kabupaten Sleman (DIY) di selatan, serta

Kabupaten Purworejo dan Wonosobo di barat. Posisi tersebut menjadikan Kabupaten Magelang sebagai wilayah penyangga kawasan perkotaan Yogyakarta-Seamrang serta memiliki mobilitas sosial politik yang relatif dinamis.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang tahun 2024, jumlah penduduk mencapai sekitar 1.337.411 jiwa dengan kepadatan ± 1.207 jiwa/km². Komposisi penduduk relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, serta mayoritas berada pada usia produktif.

Tabel 2. 3. Kondisi Demografi Kabupaten Magelang (2024)

Indikator	Nilai
Luas wilayah	1.085,73 km ²
Jumlah penduduk	1.337.411 jiwa
Kepadatan penduduk	± 1.207 jiwa/km ²
Jumlah kecamatan	21
Jumlah desa	372
Persentase usia produktif	$\pm 69\%$
Mata pencaharian utama	Pertanian & jasa

Sumber : Diolah dari BPS Kabupaten Magelang Tahun 2024

Data di atas menunjukkan bahwa dominasi usia produktif menunjukkan potensi partisipasi politik tinggi, khususnya pemilih rasional dan pemilih pemula yang menjadi fokus penting dalam kualitas demokrasi elektoral.

Secara historis, wilayah Kabupaten Magelang memiliki jejak peradaban panjang sejak masa kerajaan Hindu–Buddha di Jawa Tengah. Kawasan Kedu, yang kini mencakup wilayah Magelang, berkembang sebagai pusat kebudayaan dan keagamaan pada masa Mataram Kuno sekitar abad ke-8–9 Masehi. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan kompleks percandian seperti Candi Borobudur,

Candi Mendut, dan Candi Pawon yang menunjukkan tingkat organisasi sosial dan religius masyarakat yang tinggi (Soekmono, 1988). Pada periode ini masyarakat tersusun dalam komunitas desa agraris (wanua) dengan aktivitas ekonomi berbasis pertanian serta jalur perdagangan antarwilayah (Ricklefs, 2008).

Memasuki masa kolonial Belanda abad ke-19, wilayah Magelang berkembang menjadi pusat administrasi Karesidenan Kedu sekaligus kawasan militer strategis karena posisinya berada pada jalur penghubung Yogyakarta dan Semarang. Pemerintah kolonial membangun pusat pemerintahan modern di sekitar alun-alun dan tangsi militer serta menerapkan sistem birokrasi administratif, pencatatan penduduk, dan pengelolaan wilayah yang lebih terstruktur (Ricklefs, 2008). Struktur pemerintahan tersebut kemudian menjadi dasar pembentukan administrasi pemerintahan daerah setelah Indonesia merdeka.

Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945) sistem pemerintahan sipil digantikan oleh pemerintahan militer, sebagaimana terjadi di berbagai wilayah Indonesia (Kahin, 1952). Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan lokal kembali dibentuk dan wilayah Magelang masuk dalam administrasi Provinsi Jawa Tengah. Melalui kebijakan desentralisasi pemerintahan, Kabupaten Magelang kemudian berkembang menjadi daerah otonom dengan pusat pemerintahan berada di Kota Mungkid (Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2024).

Sejak kemerdekaan, kepemimpinan daerah Kabupaten Magelang mengalami beberapa kali pergantian kepala daerah mengikuti sistem pemerintahan nasional. Setelah diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung pada era

reformasi, masyarakat Kabupaten Magelang memilih bupati melalui mekanisme elektoral sebagai bagian dari demokrasi lokal. Hingga tahun 2024, penyelenggaraan pemerintahan daerah berlangsung melalui pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah serentak yang menjadi sarana legitimasi pemerintahan daerah di tingkat lokal (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Magelang, 2024).

2.3 Kondisi Sosial Ekonomi di Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan kecil, serta sektor informal. Struktur ekonomi daerah masih menunjukkan kecenderungan agraris dengan sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan usaha mikro. Karakteristik ini menempatkan sebagian masyarakat dalam kondisi ekonomi yang relative rentan terhadap fluktuasi pendapatan.

Tabel 2. 4. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Magelang, 2015–2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/perkapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2015	253.866	162,38	13,07
2016	271.800	158,86	12,67
2017	281.237	157,15	12,42
2018	296.327	143,44	11,23
2019	325.921	137,45	10,67
2020	342.430	146,34	11,27
2021	353.608	154,91	11,91
2022	377.497	145,33	11,09
2023	411.129	144,49	10,96
2024	431.289	143,80	10,83

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang (2024)

Berdasarkan data di atas persentase penduduk miskin pada tahun 2024 mencapai 10,89% atau 143,80 ribu jiwa. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya, tingkat kemiskinan ini masih tergolong cukup signifikan. Selain itu, distribusi kemiskinan cenderung lebih tinggi pada wilayah perdesaan dibandingkan kecamatan dengan pusat aktivitas ekonomi seperti Mertoyudan dan Muntilan.

Kondisi sosial ekonomi yang relatif rentan memiliki implikasi terhadap perilaku politik masyarakat. Dalam kajian perilaku pemilih, kondisi ekonomi sering dikaitkan dengan kecenderungan *voting pragmatic*, yaitu keputusan politik yang dipengaruhi oleh pertimbangan manfaat jangka pendek. Dalam pendekatan sosial pilihan politik sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial dan lingkungan komunitas (Lazarsfeld, Berelson, & Gaudet, 1968). Pada masyarakat dengan

ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap patron atau tokoh lokal, pilihan politik dapat terbentuk melalui jaringan sosial dan relasi patronase. Di sisi lain, pendekatan pilihan rasional menjelaskan bahwa pemilih akan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dari suatu pilihan politik (Downs, 1956). Dalam konteks masyarakat dengan tekanan ekonomi, preferensi memilih dapat bergeser dari pertimbangan program jangka panjang menuju insentif langsung atau bantuan material. Kondisi ini berpotensi melemahkan kompetensi demokratis apabila keputusan politik tidak didasarkan pada evaluasi rasional terhadap kebijakan publik.

Selain tingkat kemiskinan, struktur pekerjaan yang didominasi sektor informal juga memengaruhi pola akses informasi politik. Pekerja sektor informal cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap forum diskusi publik maupun informasi politik yang mendalam. Ketidakpastian ekonomi yang hadir karena dominasi dari pekerjaan sektor informal menunjukkan stabilitas pendapatan yang fluktuatif. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh 3,5% penduduk yang termasuk kedalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2024). Ketidakpastian ekonomi yang hadir dapat memengaruhi preferensi politik masyarakat.

Kondisi sosial ekonomi Kabupaten Magelang menunjukkan adanya kombinasi antara kerentanan ekonomi, struktur pekerjaan agraris, dan distribusi wilayah perdesaan yang berpotensi memengaruhi kompetensi demokratis masyarakat. Konteks ini mempertegas urgensi penelitian mengenai pengaruh

pendidikan politik dan pendidikan pemilih terhadap kompetensi demokratis pemilih pada pemilu 2024

2.4 Kondisi Politik Lokal dan Kepemiluan

Dinamika politik lokal dan penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Magelang merupakan konteks empiris yang relevan dalam menilai kualitas demokrasi pada level daerah. Sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah pemilih yang besar di Provinsi Jawa Tengah, konfigurasi politik di wilayah ini tidak hanya mencerminkan praktik demokrasi elektoral, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kualitas partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 68 Tahun 2003, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 mencapai 1.007.591 pemilih yang tersebar di 21 kecamatan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, 2023). Skala elektoral yang besar ini menunjukkan kompleksitas sosial dan politik yang beragam, mengingat distribusi pemilih mencakup wilayah dengan karakter perdesaan, semi-perkotaan, serta pusat aktivitas ekonomi lokal. Secara nasional, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 tercatat mencapai 81% (KPU RI, 2024). Tingginya partisipasi ini sering dipandang sebagai indikator keberhasilan demokrasi elektoral. Akan tetapi, dalam perspektif demokrasi substantif, partisipasi kuantitatif belum tentu mencerminkan kualitas pengambilan keputusan politik. Demokrasi menuntut adanya *enlightened understanding*, yakni kemampuan warga negara memahami alternatif kebijakan sebelum menentukan preferensi politiknya (Dahl R. A., 1989). Keberhasilan prosedural Pemilu perlu dievaluasi bersamaan dengan kualitas rasionalitas pemilih.

Tabel 2. 5. Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Jawa Tengah Dengan

Kategori Tinggi

KABUPATEN/KOTA	SKOR IKP 2024
KABUPATEN KENDAL	53,25299835
KABUPATEN MAGELANG	54,24869919
KABUPATEN WONOSOBO	58,34930038
KABUPATEN TEMANGGUNG	59,0522995
KABUPATEN PURWOREJO	67,11100006
KABUPATEN SUKOHARJO	70,19750214
KOTA SEMARANG	73,25720215

Sumber : Informasi Kerawanan Pemilu Bawaslu

Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 tersebut memperlihatkan Kabupaten Magelang termasuk dalam wilayah dengan kategori tinggi dengan skor IKP 54,24 yang mengidentifikasi bahwa wilayah Kabupaten Magelang memiliki nilai yang tinggi dalam indikator pelanggaran Pemilu, seperti politik uang, pelanggaran netralitas aparatur, dan potensi konflik sosial. Dalam konteks kepemiluan Kabupaten Magelang ditemukan juga beberapa dugaan pelanggaran yaitu partai politik yang melakukan kampanye Non STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) (Hidayat, 2024). Berdasarkan IKP dan temuan tersebut menunjukkan bahwa integritas proses elektoral tetap menghadapi tantangan struktural di Kabupaten Magelang. Politik uang sebagai bentuk relasi transaksiona; berpotensi mereduksi otonommi pilihan pemilih, karena preferensi politik tidak sepenuhnya dibangun atas evaluasi program atau ideologi.

Temuan ini sejalan dengan analisis dalam lieteratur politik Indonesia yang menunjukkan bahwa praktik patronase dan *vote buying* cenderung terjadi pada wilayah dengan struktur sosial berbasis komunitas dan ketergantungan ekonomi

relatif tinggi. Relasi patron-klien dalam konteks lokal dapat memfasilitasi distribusi insentif material menjelang pemilu, sehingga memengaruhi perilaku memilih secara pragmatis (Aspinall & Sukmajati, 2016). Keputusan menerima insentif material dapat dipahami sebagai kalkulasi manfaat jangka pendek, meskipun secara normative berpotensi melemahkan kualitas demokrasi. Selain politik uang, aspek netralitas aparatur sipil negara juga menjadi salah satu perhatian dalam pengawasan Pemilu di tingkat daerah. Netralitas aparat sipil menjadi krusial karena keterlibatan birokrasi dalam kontestasi politik dapat memengaruhi persepsi dan preferensi pemilih melalui relasi struktural yang tidak setara.

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pemilih relatif tinggi, kualitas kontestasi dan integritas elektoral tetap memerlukan perhatian. Dalam pendekatan perilaku pemilih, faktor identifikasi partai dan persepsi terhadap kandidat memang berperan penting (Campbell, Converse, Miller, & Stokes, 1960). Namun dalam konteks lokal dengan potensi relasi patronase, dimensi sosial-ekonomi dan struktur kekuasaan lokal turut memengaruhi pembentukan preferensi politik.

Dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang besar, adanya temuan pelanggaran selama tahapan pemilu, serta kerawanan politik uang dan netralitas aparat, Kabupaten Magelang merepresentasikan wilayah dengan demokrasi elektoral yang berjalan aktif namun menghadapi tantangan dalam aspek kualitas keputusan politik warga negara. Situasi ini memperkuat urgensi penelitian mengenai pengaruh pendidikan politik dan pendidikan pemilih terhadap kompetensi demokratis pemilih. Apabila pendidikan politik dan pendidikan pemilih

mampu meningkatkan resistensi terhadap prakti transaksional serta memperkuat evaluasi rasional pemilih. Maka kualitas demokrasi substantif di tingkat lokal dapat ditingkatkan.

2.5 Penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih

Pendidikan politik dan pendidikan pemilih merupakan instrumen yang penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam sistem demokrasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, pendidikan politik dapat dipahami sebagai proses pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memperluas pemahaman, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik. Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara serta berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dalam sistem demokrasi.

Dari sisi kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan politik juga menjadi salah satu fungsi utama partai politik. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menegaskan bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Tujuan dari kewajiban tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran politik sekaligus mendorong partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi.

Di tingkat lokal, pelaksanaan pendidikan politik seharusnya dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti diskusi publik, sosialisasi kepemiluan, serta kegiatan kaderisasi yang diselenggarakan oleh partai

politik. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem politik dan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, pendidikan politik merupakan bagian dari proses pembentukan budaya politik yang partisipatif dalam masyarakat demokratis (Almond & Verba, 1963). Namun demikian, dalam praktiknya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik sering kali masih berorientasi pada mobilisasi dukungan elektoral dibandingkan dengan peningkatan literasi politik masyarakat secara substantif. Kondisi ini menyebabkan pendidikan politik belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana penguatan kapasitas demokratis warga negara.

Sementara itu, pendidikan pemilih secara kelembagaan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Dasar hukum pelaksanaan pendidikan pemilih diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendidikan pemilih bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih. Di Kabupaten Magelang, kegiatan pendidikan pemilih dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang melalui berbagai program sosialisasi kepemiluan. Kegiatan tersebut antara lain meliputi sosialisasi kepada pemilih pemula di sekolah dan perguruan tinggi, diskusi kepemiluan dengan kelompok masyarakat, serta penyebaran informasi melalui media digital. Pemanfaatan media sosial menjadi

salah satu strategi yang digunakan untuk menjangkau kelompok pemilih muda yang memiliki akses tinggi terhadap teknologi informasi.

Selain kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat, pendidikan pemilih juga dilakukan melalui program edukasi kepemiluan seperti Rumah Pintar Pemilu yang bertujuan memberikan informasi mengenai sistem pemilu, tahapan pemilu, serta pentingnya partisipasi politik masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi serta mendorong partisipasi pemilih yang lebih berkualitas. Pelaksanaan pendidikan pemilih di Kabupaten Magelang juga mendapat perhatian dalam pemberitaan media lokal. Pemberitaan oleh Tribun Jateng melaporkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang secara aktif melakukan sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024, termasuk kegiatan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula di sekolah-sekolah (Winduajie, 2023). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Selain itu, pemberitaan oleh Suara Merdeka juga menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang mencakup edukasi mengenai tata cara pemungutan suara, pentingnya partisipasi politik, serta upaya pencegahan praktik politik uang dalam pemilu (Amani, 2024). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Magelang juga melaksanakan program pengawasan partisipatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu.

Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, Bawaslu mendorong partisipasi publik dalam mencegah pelanggaran pemilu seperti politik uang dan pelanggaran kampanye. Program ini juga dilaporkan dalam berbagai pemberitaan media lokal sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas pemilu di tingkat daerah.

Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan politik dan pendidikan pemilih di Kabupaten Magelang melibatkan berbagai aktor kelembagaan dengan peran yang berbeda namun saling melengkapi. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik berperan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sementara pendidikan pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai proses dan mekanisme pemilu. Sinergi antara kedua bentuk pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi demokratis pemilih sehingga masyarakat mampu mengambil keputusan politik secara rasional dan bertanggung jawab.